

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini penting karena penulis menemukan faktor lain yang menyebabkan masih tingginya tingkat *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok hingga tahun 2018 di tengah progresivitas upaya pemerintah Vietnam mengatasi masalah tersebut. *Bride trafficking* telah meluas ke hampir seluruh kawasan dunia termasuk Asia Tenggara. Vietnam merupakan negara peringkat 1 se-Asia Tenggara yang memiliki tingkat *bride trafficking* tertinggi pada tahun 2018. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat 1.207 perempuan Vietnam direkrut, dikirim, dan dijual sebagai *bride* ke negara-negara, baik dalam maupun luar kawasan pada tahun 2018 sekedar untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki yang menjadi suaminya kelak (Home Office UK 2018). Pada tahun yang sama, Vietnam masuk ke deretan 10 besar negara di dunia yang penduduk perempuannya banyak terlibat dalam aktivitas *bride trafficking*. Realitas ini mendorong penulis untuk memilih Vietnam sebagai obyek penelitian dalam kasus *bride trafficking*. Pada umumnya, perempuan Vietnam lebih banyak dijual ke Tiongkok dibandingkan ke Korea Selatan, Taiwan, maupun negara-negara Asia Tenggara. Laporan Home Office UK (2018) turut menyatakan bahwa sekitar 70% perempuan Vietnam yang terlibat dalam *bride trafficking* dijual ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan laki-laki di sana. Hal ini didukung oleh beberapa alasan mengapa laki-laki Tiongkok memilih perempuan dari Vietnam bukan dari negara-negara *Greatest Mekong Sub-region* (GMS) lainnya yaitu Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Alasan pertama adalah genealogi etnis perempuan Vietnam yang masih serumpun dengan bangsa Han. Kemudian, alasan kedua yakni harga perempuan Vietnam lebih murah dibandingkan perempuan negara-negara GMS lainnya. Alasan ketiga ialah memperoleh perempuan Vietnam dari *broker* atau perekrut lebih mudah karena area perbatasan Vietnam-Tiongkok cenderung bergunung, sehingga sulit dijangkau oleh badan keamanan Vietnam.

Di sisi lain, pemerintah Vietnam sebenarnya telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi permasalahan *bride trafficking* ini. Upaya awal yang dilakukan pemerintah Vietnam adalah dengan membuat aturan hukum. *The Vietnam National Action Programme against Trafficking in Children and Women 2004-2010* (VNAP) merupakan hukum yang berisikan serangkaian rencana tindakan yang berfokus pada penghapusan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi, nikah paksa, maupun tujuan lain (Home Office UK 2018). Terdapat empat komponen utama yang ditekankan dalam VNAP. Pertama, pendidikan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk masyarakat. Kedua, memerangi perdagangan perempuan dan anak. Ketiga, penerimaan dan pemberian dukungan kepada korban perempuan dan anak-anak yang kembali dari luar negeri. Keempat, penguatan sanksi dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Di samping itu, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan *Vietnamese Marriage and Family Law* pada tahun 2014 (Le 2017). Dalam Artikel 4 mengenai Perlindungan terhadap Pernikahan dan Keluarga, ditekankan beberapa larangan yang salah satunya yaitu larangan mengambil keuntungan dari pernikahan untuk eksploitasi seksual, perbudakan, serta kegiatan lainnya yang melanggar hak dasar manusia. Hukum ini berupaya untuk melindungi perempuan Vietnam supaya terbebas dari eksploitasi seksual maupun tenaga kerja dalam suatu ikatan pernikahan.

Meninjau lebih lanjut, upaya pemerintah Vietnam dalam mengatasi praktik *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok juga dapat ditunjukkan dengan keputusan Vietnam untuk membuat perjanjian-perjanjian mengenai penanganan perdagangan manusia dengan negara lain maupun organisasi internasional. Pertama, Vietnam menandatangani perjanjian dengan negara-negara GMS yakni *the Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Memorandum of Understanding* (COMMIT MoU) atau disebut juga dengan *Sub-regional Plan of Action* (SPA). SPA I tahun 2005-2007 merupakan perjanjian yang memprioritaskan pelatihan, identifikasi korban dan penangkapan pelaku, *National*

*Plans of Actions* (NPAs), kerja sama multi-sektoral dan bilateral, kerangka hukum, repatriasi, perlindungan korban dan reintegrasi, menangani praktik *broker* yang eksploitatif, manajemen koordinasi, pengawasan, dan evaluasi, serta kerja sama sektor pariwisata. Sedangkan, SPA II tahun 2008-2010 berfokus pada perluasan potensi negara-negara GMS untuk memerangi perdagangan manusia secara kolaboratif dan efektif (Le 2017). Negara-negara GMS turut merancang SPA III tahun 2011-2013 dan SPA IV tahun 2015-2018. Kedua, Vietnam turut menjalin hubungan kerja sama strategis dengan negara-negara *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Vietnam menyetujui *the Treaties on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like-minded ASEAN Member Countries* (ASEAN MLAT) pada tahun 2004. Perjanjian ini sebagai pedoman ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka memerangi kejahatan terorganisir lintas negara termasuk *bride trafficking*. Tak hanya itu, Vietnam juga menandatangani dokumen multilateral lainnya dengan ASEAN yakni *the ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2004 (ASEAN 2006). Deklarasi tersebut secara resmi berubah menjadi konvensi pada bulan November 2015. Ketiga, Vietnam turut mengaksesi perjanjian yang dikeluarkan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* atau yang kerap disebut dengan UN TIP Protocol pada tanggal 8 Juni 2012 (PBB 2015).

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Vietnam guna mengatasi isu *bride trafficking* adalah menjalin kerja sama dengan komunitas lokal yang berfokus pada isu perdagangan perempuan yaitu *Vietnam Women's Union* (VWU). Kerja sama antara keduanya dapat dilihat dari pembentukan *Clubs for Trafficking Prevention*. Le (2017) menyoroti *Taxi Driver Club in Fighting Crime* sebagai salah satu contoh *club* yang ikut berperan dalam memerangi perdagangan manusia. Mereka dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi perilaku penumpangnya yang mencurigakan. Informasi tersebut kemudian dilaporkan

kepada polisi, penjaga perbatasan, maupun pihak berwenang setempat. Selain itu, pemerintah Vietnam turut memperketat keamanan di daerah perbatasan antara Vietnam dan Tiongkok mulai tahun 2013. Hal ini mengingat daerah perbatasan merupakan jalur utama bagi *bride matchmaking agencies* atau *marriage agencies* untuk membawa korbannya masing-masing ke Tiongkok (Le 2017). Sebagai tindakan lanjutan, pemerintah Vietnam memperkuat sanksi hukum bagi pihak *trafficker* yang menjual perempuan sebagai korban perdagangan. Pada tahun 2015, dilakukan amandemen *Penal Code*<sup>1</sup> bahwa pihak pelaku yang memperjualbelikan perempuan akan dituntut hukuman selama 5 hingga 10 tahun penjara dan denda VND 20 juta hingga 100 juta atau setara dengan US\$ 880 hingga US\$ 4.400. *Penal Code* ini mulai diberlakukan pada bulan Januari 2018 (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 2018).

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni mengapa tingkat *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok masih tinggi sampai dengan tahun 2018, meski pemerintah Vietnam sudah melakukan langkah-langkah progresif untuk mengatasinya?

### 1.3. Kerangka Berpikir

Globalisasi telah menghilangkan batas-batas aktor negara maupun non negara di wilayah yang berbeda. Sebagai akibatnya, kerja sama pada bidang ekonomi antaraktor hubungan internasional, baik perdagangan barang dan jasa maupun investasi mengalami perkembangan secara signifikan. Tak hanya itu, inovasi teknologi komunikasi dan informasi juga kian meningkat hingga muncul istilah yang disebut dengan globalisasi teknologi (Archibugi dan Pietrobelli 1999). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwasanya globalisasi memiliki sisi gelapnya. Perubahan ekonomi dan politik serta kemajuan teknologi komunikasi di level

---

<sup>1</sup> *Penal Code* merupakan konstitusi Vietnam yang bertujuan untuk mendefinisikan segala bentuk kejahatan dan sanksi hukum bagi pelaku. *Penal Code* pertama kali dikeluarkan pemerintah Vietnam pada tahun 1985, kemudian diamandemen pada tahun 1999. Namun, ditemukan kelemahan-kelemahan dalam *Penal Code* tersebut, sehingga pemerintah Vietnam memutuskan untuk kembali melakukan amandemen *Penal Code* pada tahun 2015. *Penal Code* 2015 secara resmi diberlakukan sejak bulan Januari 2018 (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2018)

global berkontribusi atas munculnya aktor non negara yang berpotensi mengancam keamanan internasional yaitu *transnational criminal organizations* (TCOs). Kemudian, TCOs mengalami perkembangan lebih lanjut didukung oleh faktor-faktor yaitu pertama, lemahnya kapabilitas aparat hukum dalam menangani semakin banyaknya aktivitas ekonomi transnasional. Situasi ini memudahkan TCOs untuk menyembunyikan berbagai transaksi gelapnya. Kedua, kemudahan transportasi di level internasional. TCOs memanfaatkan peluang ini untuk memobilisasi produk-produknya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata yaitu manusia, uang, dan informasi secara lintas batas. Ketiga, globalisasi jaringan keuangan internasional. Bahkan, pusat keuangan global sekarang ini tidak hanya terhubung antarnegara, akan tetapi juga antarkota. Sebagai konsekuensinya, TCOs mampu memindahkan hasil keuntungan dari transaksi gelapnya dengan cepat dan mudah.

Keberadaan TCOs dapat dijelaskan dengan menggunakan *push and pull theory*. Faktor-faktor penting yang mendorong anggota TCOs mampu menguasai pasarnya adalah kemiskinan, penegakan hukum yang lemah, dan buruknya pengawasan di daerah perbatasan. Sedangkan, faktor penariknya yaitu tingginya tingkat permintaan atas barang dan jasa ilegal (Morselli 2011). Penulis lain bernama Edward R. Kleemans (dalam Paoli 2014) menjelaskan enam pendekatan teoretis mengenai TCOs secara komprehensif yakni *alien conspiracy model*, *bureaucracy model*, *illegal enterprise theory*, *protection theory*, *social networks approach*, serta *logistic or situational approach toward organized crime*. *Alien conspiracy model* dikembangkan oleh aktor pembuat keputusan di Amerika Serikat ketika banyak warga negaranya yang terlibat dalam kelompok mafia Italia. Para imigran Italia dipandang telah menggiring isu tersebut ke Amerika Serikat selama gelombang migrasi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Atas dasar itu, *alien conspiracy model* menekankan bahwa permasalahan TCOs bukan dibentuk secara mandiri oleh masyarakat yang demokratis dan terbuka, melainkan oleh orang-orang dari luar wilayah atau disebut dengan *outsiders*. Sementara itu, *bureaucracy model* menjelaskan bahwa TCOs merupakan sebuah organisasi yang

kurang lebih bersifat formal. Asumsi ini diperkuat dengan argumen para pendukung *bureaucracy model* yaitu TCOs berbentuk piramid yang dilengkapi dengan struktur hierarki yang kaku. Selain itu, TCOs turut memiliki pembagian tugas yang jelas, kode etik, serta sanksi internal maupun eksternal. Namun, teori ini memperoleh kritikan sekitar tahun 1970-an karena para ilmuwan melihat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa TCOs berbentuk *networks* dan mereka justru beroperasi secara fleksibel.

Beralih ke *illegal enterprise theory*, teori ini menyatakan bahwa aktivitas ilegal sangat mirip dengan aktivitas legal. TCOs dan perusahaan multinasional sama-sama memiliki orientasi utama yakni memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan beroperasi atas dasar hukum permintaan-penawaran. Akan tetapi, untuk mengejar tujuannya tersebut, TCOs melakukan aktivitas-aktivitasnya tanpa mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara (Kleemans dalam Paoli 2014). Berbagai aktivitas TCOs akan dipaparkan pada paragraf-paragraf berikutnya. Ketiga pendekatan di atas memiliki sejarah panjang dalam penelitian dan seringkali muncul dalam debat publik. Kemudian, *protection theory* adalah salah satu teori kontemporer yang muncul berdasarkan dengan historis kelompok mafia saat mengontrol wilayah tertentu. Teori ini menjelaskan bahwasanya negara tidak memiliki kemampuan untuk melindungi hak milik dan transaksi ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu, TCOs dalam hal ini kelompok mafia mengambil kesempatan ini dengan menjadi *alternative governments* yang dapat menyediakan layanan tersebut.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat teori yang mengkritik asumsi *bureaucracy model* yang menyatakan bahwa TCOs bukan merupakan sebuah organisasi yang bersifat rigid, sebaliknya TCOs adalah organisasi yang menekankan prinsip fleksibilitas dalam mengoperasikan bisnis gelapnya. Teori yang dimaksud ini adalah *social networks approach*. Kleemans (dalam Paoli 2014) mengungkapkan bahwa sistem penetapan anggota TCOs tidak dibatasi oleh latar belakang etnis, status ekonomi, dan tempat asal. Tiap anggotanya juga tidak harus melekat pada kedudukan tertentu dalam struktur TCOs. Dalam teori ini,

dijelaskan juga bahwa orang-orang penting, seperti investor, penyelenggara, dan fasilitator mampu digantikan oleh orang lain. Atas dasar itu, TCOs memandang bahwa penangkapan atau penyitaan sebagai sesuatu yang tidak begitu krusial karena koneksi mungkin saja hilang, tetapi rantainya dapat mudah diperbaiki. *Logistic or situational approach toward organized crime*, teori TCOs kontemporer yang terakhir, secara garis besar menjelaskan peluang dan kendala dari lingkungan terhadap operasi TCOs.

Tiap TCOs diidentifikasi memiliki skala dan fokusnya masing-masing. Ada TCOs yang berkonsentrasi pada penipuan kartu kredit. Selain itu, Albanese (2012) menambahkan TCOs yang menyediakan, menjual, dan mendistribusikan obat-obatan terlarang hampir ke seluruh dunia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi sekarang ini. Salah satunya adalah Colombian Cartels. Ada pula TCOs yang memiliki fokus aktivitas lebih dari satu yaitu Cuntrera-Caruana Clan. Organisasi ini memiliki jaringan luas untuk perdagangan narkoba dan pencucian uang. Penyebaran TCOs diketahui hingga ke kawasan Asia yang ditunjukkan dengan kemunculan Japanese Yakuza. Sama halnya dengan organisasi sebelumnya, Japanese Yakuza tidak hanya berfokus pada satu aktivitas saja, melainkan beberapa aktivitas yang melingkupi perdagangan narkoba, pemerasan, dan judi. Tak hanya itu, ada juga TCOs yang fokus pada aktivitas perdagangan manusia saja, akan tetapi di dalamnya mencakup penjualan organ tubuh, eksploitasi buruh, prostitusi, dan *bride trafficking*. Dari berbagai aktivitas TCOs tersebut, *bride trafficking* merupakan aktivitas TCOs yang paling menguntungkan setelah perdagangan narkoba dan eksploitasi buruh sejak abad ke-20.

TCOs menentukan wilayah sumber korban *bride trafficking* atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu terutama faktor permintaan konsumen yang berada di wilayah berbeda atau disebut dengan negara tujuan. Pada umumnya, permintaan konsumen muncul disebabkan oleh adanya permasalahan ketimpangan *sex ratio* di negara tujuan. Nilai budaya yang menempatkan posisi perempuan di atas laki-laki mampu mengkonstruksi pemikiran kaum ibu untuk

harus memiliki anak laki-laki. Jika mengandung anak perempuan, mayoritas ibu melakukan aborsi atau menyerahkan anak perempuannya kepada lembaga adopsi setelah proses kelahiran selesai. Dampak pada tahun-tahun berikutnya yakni populasi penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Di samping itu, kebijakan ekonomi negara turut berpotensi memunculkan isu ketimpangan *sex ratio* yaitu *one-child with sex selection policy* (Li 2011). Permintaan konsumen *bride trafficking* ini dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu yang diperhatikan secara serius oleh *broker* yaitu selera penampilan fisik, harga, dan persamaan nilai-nilai budaya.

Guna memperoleh korban yang akan dijadikan sebagai penawaran ke pasar konsumen *bride trafficking*, TCOs menerapkan dua strategi utama yaitu penipuan dan kekerasan maupun ancaman. Strategi yang pertama, *broker* memberikan janji-janji manis terhadap korban mulai dari akan memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah tinggi, hingga menikmati fasilitas tempat tinggal gratis. Sedangkan strategi yang kedua, *broker* tidak menggunakan pendekatan secara halus, melainkan dengan kekerasan. Korban diculik secara paksa oleh sekelompok *broker*, kemudian dibawa dan dikumpulkan dengan korban-korban lainnya di sebuah tempat khusus yang disertai dengan pengawasan ketat. Apabila korban melakukan perlawanan, pihak *broker* tidak segan melakukan kekerasan secara langsung terhadap korban, baik pemukulan maupun pelecehan. Namun, mayoritas TCOs lebih mengutamakan strategi penipuan dibandingkan kekerasan atau ancaman untuk menghindari upaya melarikan diri atau perlawanan fisik yang dilakukan oleh korban (Hoang 2015). Kekerasan dan ancaman ditetapkan sebagai opsi terakhir oleh TCOs untuk merekrut korban *bride trafficking*.

Kehadiran TCOs disambut positif oleh kaum perempuan di wilayah sumber korban apabila strategi yang digunakan oleh TCOs tepat sasaran, terlebih lagi dipengaruhi oleh isu-isu domestik di negara bersangkutan, yang mana semakin memberikan peluang besar bagi TCOs untuk mempertemukan sisi permintaan dan penawaran korban *bride trafficking* yaitu masih menguatnya budaya patriarki dan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Budaya



patriarki membatasi hak-hak perempuan yang tidak hanya berupa hak warisan, melainkan juga mencakup hak lainnya yaitu hak pendidikan. Perempuan dianggap tidak pantas memperoleh akses pendidikan seperti kaum laki-laki. Hal ini didukung oleh alasan bahwa perempuan akan mengatur urusan rumah tangga pada nantinya (Tong 2009). Keterbatasan pengetahuan dan keahlian menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan terutama pekerjaan formal. Ditambah lagi, di negara yang masih kental dengan budaya patriarki, kesempatan kerja untuk perempuan juga diketahui minim. Alhasil, status ekonomi mereka tergolong rendah, sehingga mereka nekad mengambil jalur pintas yaitu melakukan migrasi secara sukarela demi memulihkan perekonomiannya serta keluarganya. Padahal di sisi lain, aktivitas migrasi ini erat kaitannya dengan kejahatan transnasional *bride trafficking*. Menambahkan dua faktor di atas, ada pula faktor lain yang turut memperluas ruang gerak TCOs untuk melanggengkan bisnis ilegal *bride trafficking* yaitu lemahnya kemampuan negara dalam menghadapi TCOs. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah negara tidak mematuhi *good governance* yang telah disepakati bersama dengan komunitas internasional terkait dengan penanganan masalah *bride trafficking*.

#### **1.4.Hipotesis**

Penulis memiliki hipotesis bahwasanya meski pemerintah Vietnam sudah melakukan langkah-langkah progresif, tingkat *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok masih tinggi sampai dengan tahun 2018 karena disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, eksistensi TCOs yang berhasil melanggengkan operasi bisnis ilegal *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok. Kedua, masih menguatnya budaya patriarki dalam masyarakat Vietnam yang berdampak pada rendahnya kapabilitas ekonomi kaum perempuan Vietnam. Ketiga, negara tidak mampu menerapkan *good governance* yang secara fokus menangani isu *bride trafficking*.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **1.5.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep**

#### **1.5.1.1. *Bride Trafficking***

*Bride trafficking* merupakan salah satu jenis perdagangan manusia. Aronowitz dan Koning (2015) mengungkapkan bahwa *bride trafficking* merupakan penjualan perempuan dari wilayah tertentu ke wilayah lainnya untuk tujuan menikah. Sementara itu, Stock et al. (2017) menjelaskan lebih lengkap bahwa *bride trafficking* ialah perekrutan, pengiriman, dan penerimaan perempuan dengan menggunakan cara kekerasan maupun penipuan dengan tujuan menikah. Penulis mendefinisikan *bride trafficking* sebagai penjualan perempuan secara ilegal ke negara-negara lain untuk tujuan menikah dengan melibatkan tiga pihak yaitu penjual dan *broker*, korban, serta konsumen. Dalam tulisan ini, *bride trafficking* mengacu pada penjualan perempuan Vietnam ke kaum laki-laki Tiongkok melalui jasa *broker* yakni agen yang bergabung dalam TCOs tertentu.

#### **1.5.1.2. TCOs**

TCOs adalah kumpulan individu dan kelompok yang terkoneksi antara satu sama lain dan bekerja sama dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui tindakan tidak manusiawi (Zhidkova 2011). Sejalan dengan pendapat itu, Löwenheim (2002) menjelaskan bahwa TCOs ialah organisasi yang menyediakan barang dan jasa secara ilegal dengan menggunakan kekerasan atau paksaan secara langsung untuk melawan individu, masyarakat, dan negara yang tidak mendukung aktivitas maupun mekanisme kerja mereka. Sedangkan, Williams (dalam Arquilla dan Ronfeldt 1994) memiliki pandangan bahwa TCOs merupakan jaringan organisasi yang beroperasi lintas batas untuk mencapai tujuan ekonomi daripada politik, namun dengan tidak memedulikan persetujuan atau negosiasi bersama negara, sebaliknya sengaja melanggar aturan, norma, dan hukum domestik di negara bersangkutan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penulis memahami TCOs sebagai sekelompok entitas yang menjalankan aktivitasnya di berbagai wilayah negara tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan menggunakan kekerasan sebagai alatnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang diinginkan. Dalam tulisan ini, TCOs yang dimaksud yaitu TCOs yang

berkontribusi dalam melanggengkan operasi bisnis ilegal *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok, salah satunya Chinese Triad.

#### **1.5.1.3. Budaya Patriarki**

Menurut Mitchell (1971), budaya patriarki ialah sistem kekerabatan yang menunjukkan posisi laki-laki di atas perempuan. Sementara, Jagger dan Rosenberg (1984) mempunyai pandangan bahwa budaya patriarki merupakan seperangkat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan kemandirian dan solidaritas kaum laki-laki serta memungkinkan mereka untuk menempatkan perempuan pada posisi yang paling rendah. Dari definisi-definisi di atas, budaya patriarki dapat dipahami secara sederhana sebagai sistem nilai yang menonjolkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan perempuan sebagai pihak yang ditindas. Dalam tulisan ini, budaya patriarki mengacu pada dominasi laki-laki Vietnam terhadap perempuan Vietnam dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan.

#### **1.5.1.4. Good Governance**

Koffi Annan (dalam Weiss 2000) berpendapat bahwa *good governance* merupakan seperangkat nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mempromosikan transparansi dan kapasitas dalam administrasi publik. Sementara itu, UNESCAP (t.t.) menyebutkan bahwa *good governance* ialah proses pengambilan keputusan yang menekankan prinsip-prinsip partisipasi, konsensus, tanggung jawab, transparansi, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta tunduk terhadap hukum. Penulis mendefinisikan *good governance* sebagai tata kelola yang bertujuan untuk menyediakan kebaikan bersama dengan memerhatikan nilai, norma, atau prinsip transparansi, menghargai hak asasi manusia, dan adil. Dalam tulisan ini, *good governance* yang dimaksud adalah perjanjian antara Vietnam dan negara-negara lain di level subregional, regional, dan internasional mengenai penanganan isu perdagangan manusia termasuk *bride trafficking*.

### 1.5.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat eksplanatif yang menyajikan hubungan antarvariabel yakni variabel dependen dan independen dengan tujuan menguji hipotesis (Silalahi 2006).

### 1.5.3. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan dibantu oleh penemuan empiris atas obyek penelitian. Pada tahap awal, dilakukan pengumpulan data. Setelah itu, mereduksi data berdasarkan kebutuhan penelitian. Kemudian, data diolah melalui metode mengurutkan dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Pada tahap akhir, peneliti menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Leng 2002).

### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diangkat, peneliti mengumpulkan data-data sekunder dengan menggunakan teknik studi literatur. Data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, tesis, serta *electronic sources* yakni artikel, dokumen resmi, dan berita (Burton 2000).

### 1.5.5. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini membahas *bride trafficking* perempuan Vietnam ke Tiongkok antara tahun 2004 hingga 2018. Tahun 2004 dipilih karena pada tahun tersebut pemerintah Vietnam mulai melakukan upaya menekan tingkat perdagangan manusia termasuk *bride trafficking* dengan mengeluarkan *The Vietnam National Action Programme against Trafficking in Children and Women 2004-2010* (VNAP). Sedangkan, tahun 2018 dipilih karena Vietnam dinobatkan sebagai negara peringkat 1 se-Asia Tenggara yang memiliki tingkat *bride trafficking* tertinggi, sekaligus masuk ke deretan 10 besar negara di dunia yang penduduk perempuannya banyak terlibat dalam bisnis ilegal *bride trafficking*. Di sisi lain, pemerintah Vietnam sudah gencar melawan *bride trafficking* melalui kebijakan-kebijakannya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan unit eksplanasi dengan jangkauan waktu sebelum tahun 2004. Hal ini karena penulis juga perlu mengetahui sejarah budaya patriarki di Vietnam untuk menjelaskan salah satu hipotesis.

#### **1.5.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, dan metodologi penelitian. Selanjutnya, Bab II menjelaskan keberhasilan eksistensi TCOs dalam melanggengkan bisnis ilegal *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok. Kemudian, Bab III memaparkan tentang status perempuan Vietnam di tengah budaya patriarki. Lalu, Bab IV menjelaskan ketidakmampuan negara untuk mematuhi *good governance* mengenai penanganan isu *bride trafficking*. Terakhir, Bab V berisikan kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.